

**PENGARUH PENYALURAN ZAKAT, BELANJA PEMERINTAH,
PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN TENAGA KERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**



LALA

NIM. B1061211034

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025**

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Lala
NIM : B1061211034
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Penyaluran Zakat, Belanja Pemerintah, Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak 26 Mei 2025



Lala
NIM. B1061211034

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Lala
NIM : B1061211034
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Penyaluran Zakat, Belanja Pemerintah, Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 26 Mei 2025



Lala
NIM. B1061211034

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Penyaluran Zakat, Belanja Pemerintah, Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Penanggung Jawab Yuridis


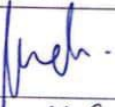



Lala

B1061211034

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Islam
Tgl Ujian Skripsi/Tugas Akhir : 25 Juni 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1	Pembimbing	Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si.	17 Juli 2025	
	Utama	NIP 196312091989031004		
2	Ketua Penguji	Metasari Kartika, S.E., M.E.	9 / 07 2025	
		NIP 198409152014042001		
3	Anggota Penguji	Aya Sofia Ardelia, S.E.I., M.E.	9 / 07 2025	
		NIP 199411302022032018		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi/Tugas Akhir



Pontianak, 17 JUL 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Islam


Dr. H. Memet Agustiar, S.E., M.A
NIP 196308151987031005

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dengan ini, Pembimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa :

Nama : Lala
NIM : B1061211034
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Tugas Akhir (TA) : Pengaruh Penyaluran Zakat, Belanja Pemerintah, Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diuji.*

	Nama/ NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
Pembimbing Tugas Akhir	Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si. NIP. 196312091989031004	22 Mei 2025	

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Wa Syukurillah Wa Ni'matillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, serta petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pengaruh Penyaluran Zakat, Belanja Pemerintah, Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dihadapi. Namun, berkat doa, bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, semua proses tersebut dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan terkasih, yakni ayah penulis (Deni) dan ibu penulis (Pahaini) yang telah mencurahkan kasih sayang, doa dan dukungan moral maupun material yang tiada henti serta mengusahakan segala hal untuk setiap jengkal mimpi penulis.
2. Saudara penulis, yakni (Edo) beserta istrinya (Bela Aspriliza) yang selalu memberikan semangat, motivasi, doa dan bantuan dalam segala hal.
3. Bapak Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing utama yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan dedikasi Bapak yang sangat berarti.

4. Ibu Metasari Kartika, S.E., M.E., selaku Dosen Pembimbing Lapangan saat penulis mengikuti program MBKM Riset, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan selama proses riset, di mana pengalaman dan ilmu yang beliau berikan menjadi bekal berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah memberikan berbagai kemudahan, dukungan, serta fasilitas yang memungkinkan penulis untuk menempuh dan menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam selama perkuliahan.
8. Dr. H. Memet Agustiar, S.E., M.A., selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Islam, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta berbagai kemudahan kepada penulis, sehingga dapat menjalani proses perkuliahan dengan baik.
9. Seluruh dosen Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, yang telah dengan tulus dan penuh dedikasi membagikan ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Semua ilmu dan nilai yang telah diberikan menjadi fondasi penting bagi penulis dalam menyusun skripsi ini dan menghadapi dunia profesional di masa mendatang.
10. Sahabat seperjuangan sekaligus sahabat dekat penulis, Hani dan Sintia yang telah kebersamaan perjalanan perkuliahan ini sedari awal, yang selalu ada disaat suka maupun duka dan senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta membantu penulis dalam banyak hal. Terima kasih karena kebaikan kalian, penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

11. Teman-teman seperjuangan EKIS angkatan 2021 terutama kelas B yang telah berbagi ilmu, kebaikan, dukungan serta dorongan semangat yang tidak ternilai dari awal proses perkuliahan hingga selesai.
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi maupun perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa baik, dukungan, bantuan serta motivasi dalam perjalanan akademik penulis hingga penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan diberi balasan yang baik dan setimpal. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ekonomi Islam.

Pontianak, 4 Juli 2025



Lala
NIM. B1061211034

**PENGARUH PENYALURAN ZAKAT, BELANJA PEMERINTAH,
PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN TENAGA KERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI ACEH**

Oleh:

Lala

Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Provinsi Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah dan didukung oleh dana otonomi khusus dari pemerintah pusat. Namun, pertumbuhan ekonominya masih relatif rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Rendahnya efektivitas pembangunan ekonomi daerah ini mendorong pentingnya evaluasi terhadap berbagai faktor yang memengaruhinya. Sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim, zakat diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penyaluran zakat, belanja pemerintah, pembangunan manusia, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh periode 2017–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode regresi data panel yang mencakup 23 kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, penyaluran zakat dan belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, sedangkan pembangunan manusia (IPM) dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Secara simultan, variabel penyaluran zakat, belanja pemerintah, pembangunan manusia, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Penyaluran Zakat, Belanja Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja

**PENGARUH PENYALURAN ZAKAT, BELANJA PEMERINTAH,
PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN TENAGA KERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI ACEH**

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Meskipun Provinsi Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam dan dana otonomi khusus, pertumbuhan ekonominya masih tergolong rendah, bahkan berada di peringkat tiga terbawah secara nasional selama periode 2017–2023. Kinerja ekonomi yang lemah ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat diyakini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli dan pengurangan kemiskinan. Namun, meskipun penyaluran zakat di Provinsi Aceh meningkat, pengelolaannya dinilai belum optimal. Selain itu, belanja pemerintah juga belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena tingginya belanja belum diikuti oleh peningkatan output ekonomi yang sepadan. Di sisi lain, pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah tenaga kerja juga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kontribusi keempat faktor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh belum banyak dikaji secara komprehensif, terlebih dalam perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penyaluran zakat, belanja pemerintah, pembangunan manusia, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

2. Permasalahan

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh menunjukkan tren yang belum optimal meskipun terdapat peningkatan dalam penyaluran zakat, belanja pemerintah, pembangunan manusia, dan jumlah tenaga kerja. Secara teoritis, keempat faktor tersebut seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, data menunjukkan bahwa peningkatan pada variabel-variabel tersebut tidak selalu diikuti oleh perbaikan kinerja ekonomi daerah. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan temuan yang tidak konsisten, baik secara signifikan positif, tidak signifikan, maupun negatif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah zakat, belanja pemerintah, pembangunan manusia, dan tenaga kerja benar-benar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Aceh.

3. Tujuan Penelitian

- i. Untuk menganalisis pengaruh penyaluran zakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh
- ii. Untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh
- iii. Untuk menganalisis pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh
- iv. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh

4. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel tidak seimbang (*unbalanced panel*) dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama tahun 2017–2023. Variabel terikat adalah pertumbuhan ekonomi (PDRB Atas Dasar Harga Konstan), sedangkan variabel bebas meliputi penyaluran zakat, belanja pemerintah, pembangunan manusia, dan tenaga kerja. Data sekunder diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Baitul Mal

Aceh, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pengujian model (*Chow, Hausman, Lagrange Multiplier*), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), lalu dilanjutkan dengan uji-t, uji F serta uji R^2 (koefisien determinasi).

5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menemukan bahwa variabel penyaluran zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dibuktikan melalui nilai t-hitung sebesar $0,792424 < t\text{-tabel } 1,975488$ dengan probabilitas sebesar $0,4295 > 0,05$. Selanjutnya, variabel belanja pemerintah juga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan hasil t-hitung sebesar $0,286534$ dengan probabilitas sebesar $0,7749$. Nilai ini juga lebih kecil dari t-tabel ($1,975488$) dan probabilitas $> 0,05$. Sedangkan variabel pembangunan manusia yang menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu nilai t-hitung $14,67568$, lebih besar dari t-tabel $1,975488$, dengan probabilitas $0,0000$ (lebih kecil dari $0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Sejalan dengan itu, variabel tenaga kerja juga menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar $1,980646$, sedikit lebih besar dari t-tabel ($1,975488$), dan probabilitas sebesar $0,0497 < 0,05$. Secara simultan, penyaluran zakat, belanja pemerintah, pembangunan manusia dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproksi oleh PDRB. Hal ini terlihat dari F-hitung ($3980,800$) yang jauh melebihi F-tabel ($2,430385$), didukung probabilitas $0,000000$ yang lebih kecil dari $0,05$. Hasil uji R^2 (koefisien determinasi) diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar $0,998475$. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar $99,85\%$ variasi perubahan pada pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas dalam model, yaitu penyaluran zakat, belanja pemerintah, pembangunan manusia, dan tenaga kerja. Sementara itu, sisanya sebesar $0,15\%$ dijelaskan oleh

faktor lain di luar model atau oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

6. Simpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini menemukan bahwa penyaluran zakat dan belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, sedangkan pembangunan manusia dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembangunan manusia dan tenaga kerja berperan penting dalam mendorong kinerja ekonomi daerah khususnya di Provinsi Aceh. Sebaliknya, penyaluran zakat dan belanja pemerintah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penyaluran zakat dan belanja pemerintah belum disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh perlu mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran zakat agar lebih produktif dan tepat sasaran. Belanja pemerintah sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan harus terus ditingkatkan. Untuk variabel tenaga kerja, diperlukan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerja agar angkatan kerja di Provinsi Aceh semakin produktif dan kompetitif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH.....	i
ABSTRAK.....	iv
RINGKASAN	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.2.1 Pernyataan Masalah	14
1.2.2 Pertanyaan Penelitian.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Kontribusi Penelitian.....	16
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Teori	16
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	16
2.1.2 Keterkaitan Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.1.3 Keterkaitan Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.1.4 Keterkaitan Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi.....	23
2.1.5 Keterkaitan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi	24
2.2 Kajian Empiris.....	26
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian	32
2.3.1 Kerangka Konseptual.....	32
2.3.2 Hipotesis Penelitian	33
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Bentuk, Tempat, dan Waktu Penelitian.....	34
3.2 Jenis dan Sumber Data	34
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	34

3.4 Metode dan Alat Analisis	36
3.4.1 Uji Statistik Deskriptif.....	37
3.4.2 Uji Model Regresi Data Panel	37
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.4.4 Analisis Regresi Data Panel.....	39
3.4.5 Pengujian Hipotesis	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Data Penelitian.....	41
4.2 Hasil Penelitian.....	43
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	43
4.2.2 Hasil Uji Model Regresi Data Panel.....	45
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	46
4.2.4 Estimasi Model Terpilih	48
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	52
4.3.1 Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Povinsi Aceh.....	52
4.3.2 Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.....	57
4.3.3 Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.....	61
4.3.4 Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	64
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Simpulan.....	68
5.2 Rekomendasi	69
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhannya di Provinsi Aceh	2
Tabel 4.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	41
Tabel 4.2	Hasil Uji Model Regresi Data Panel	43
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinearitas	46
Tabel 4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas	46
Tabel 4.5	Hasil Estimasi Model <i>Fixed Effect</i>	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Penyaluran Zakat di Provinsi Aceh	5
Gambar 1.2	Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Aceh	8
Gambar 1.3	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh	10
Gambar 1.4	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Aceh	12
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas.....	45

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara (Muttaqin, 2018). Masyarakat di wilayah dengan perekonomian yang maju akan mengalami peningkatan standar hidup karena didukung oleh infrastruktur yang memadai sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor (Safitri dkk., 2021). Pertumbuhan ekonomi global telah mengalami dinamika yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Gejolak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 berhasil melumpuhkan sebagian besar perekonomian dunia. Sampai saat ini, masih banyak negara yang berjuang untuk membangkitkan kembali perekonomian mereka, salah satunya Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2017 hingga tahun 2019 tumbuh stabil dikisaran 5-6 persen, namun ketika pandemi Covid-19 melanda, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen. Perekonomian Indonesia menunjukkan pemulihan yang cukup kuat setelah kontraksi akibat pandemi. Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 3,69 persen dan terus naik hingga pada tahun 2023 menjadi 5,04 persen. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia secara bertahap pulih dan diharapkan akan terus mengalami peningkatan.

Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat regional, yaitu total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB mencerminkan kinerja ekonomi suatu provinsi atau kabupaten/kota dan sering digunakan untuk menilai sejauh mana daerah tersebut mampu mengelola sumber daya lokalnya secara produktif. Di sisi lain, pada tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencakup seluruh output barang dan jasa yang diproduksi dalam batas wilayah suatu negara, baik oleh pelaku ekonomi domestik maupun asing. Dengan kata lain, PDB

merupakan akumulasi dari seluruh PDRB provinsi yang ada, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional sejatinya sangat dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

Salah satu provinsi yang diharapkan dapat berkontribusi lebih terhadap pembangunan ekonomi nasional adalah Provinsi Aceh. Hal ini dikarenakan Provinsi Aceh memiliki potensi alam yang melimpah serta didukung dengan dana otonomi khusus dari pemerintah pusat. Perekonomian di Provinsi Aceh sebagian besar didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan minyak serta gas alam. Namun, potensi yang ada nampaknya tidak didukung dengan pengelolaan yang baik, sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tergolong rendah. Menurut data Badan Pusat Statistik, Provinsi Aceh berada di peringkat ketiga dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia dalam periode 2017 hingga 2023. Di tingkat regional, Provinsi Aceh juga menempati posisi terendah kedua di Pulau Sumatera selama periode yang sama. Data ini menunjukkan bahwa perekonomian di Provinsi Aceh masih tertinggal baik secara nasional maupun regional.

Tabel 1.1

PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhannya di Provinsi Aceh

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB
2017	121.240,98	4,18%
2018	126.824,37	4,61%
2019	132.069,62	4,14%
2020	131.580,97	-0,37%
2021	135.274,04	2,81%
2022	140.971,72	4,21%
2023	146.932,42	4,23%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2024)

Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2017 hingga 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,40 persen per tahun. Pada tahun 2017 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi relatif stabil di atas 4 persen, mencerminkan kondisi ekonomi yang cukup baik sebelum pandemi. Namun, pada tahun 2020, Provinsi Aceh mengalami kontraksi ekonomi sebesar -0,37 persen akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda seluruh sektor, terutama sektor jasa, perdagangan, dan industri pengolahan. Meskipun demikian, ekonomi di Provinsi Aceh mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 2,81 persen, dan berlanjut meningkat menjadi 4,21 persen pada 2022 serta 4,23 persen pada 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di berbagai sektor mulai pulih, meskipun belum mencapai pertumbuhan yang tinggi secara konsisten dan masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Provinsi Aceh masih belum kuat. Jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah lemah, maka dapat memicu berbagai dampak negatif yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, penyediaan barang publik menjadi terbatas, yang berarti layanan penting seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan menjadi kurang optimal (Anwar & Nabila, 2021). Selain itu, rendahnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan berkurangnya peluang kerja, yang berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan. Sejalan dengan itu aktivitas ekonomi juga menurun sehingga mengurangi pendapatan masyarakat yang menyebabkan daya beli mereka menurun dan standar hidup pun ikut menurun (Qudah, dkk. 2022).

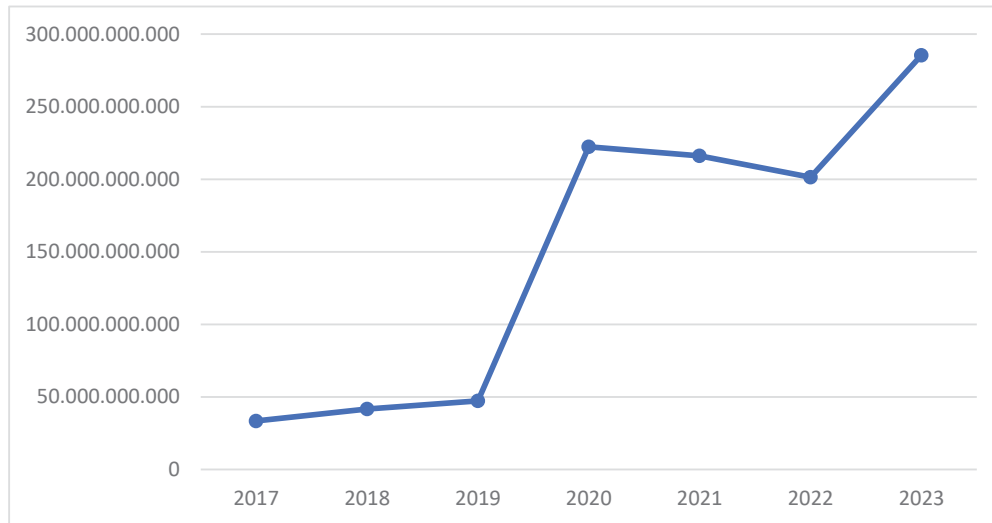
Dalam ekonomi Islam, zakat dipercaya mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Zakat dapat meningkatkan konsumsi, investasi, dan pengeluaran publik, yang mendorong pertumbuhan ekonomi (Ben Jedidia & Guerbouj, 2021). Lebih jauh lagi, Suprayitno (2020) menyebutkan bahwa zakat mempunyai efek pengganda atau *multiplier effect*, sebab zakat yang diberikan kepada mustahik akan meningkatkan pendapatan mereka, sehingga menyebabkan peningkatan daya beli dan permintaan terhadap barang dan jasa. Meningkatnya

permintaan mendorong produksi, yang memicu perusahaan untuk menambah kapasitas produksi dan mempekerjakan lebih banyak karyawan sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Peningkatan produksi juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak, yang memungkinkan negara untuk menyediakan fasilitas publik dan infrastruktur.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan otonomi khusus untuk mengimplementasikan syariat Islam secara resmi dalam sistem pemerintahannya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini juga yang menjadi dasar dari kuatnya pondasi syariat Islam di Aceh yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, mulai dari regulasi hukum, pendidikan, ekonomi, hingga sosial. Zakat di Provinsi Aceh tergabung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana disebutkan pada pasal 180 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Sudah seharusnya jika zakat menjadi perhatian pemerintah Provinsi Aceh, dengan membuat regulasi dan sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien, guna memastikan bahwa zakat tidak hanya dikumpulkan dengan baik, tetapi juga didistribusikan tepat sasaran. Lembaga yang berwenang untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat serta dana sosial di Provinsi Aceh adalah Baitul Mal Aceh. Hal ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang mengatur pengelolaan zakat. Dengan adanya pengelolaan zakat yang lebih terstruktur, zakat dapat lebih optimal dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, serta mendukung program-program pembangunan yang berkelanjutan.

Provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam serta menduduki posisi pertama sebagai provinsi dengan presentase Muslim terbesar di Indonesia ini mempunyai potensi zakat yang besar. Penyaluran zakat di Provinsi Aceh berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun optimalisasi dalam distribusi dan pemanfaatannya masih menjadi tantangan. Upaya peningkatan efisiensi distribusi zakat perlu dilakukan agar lebih tepat sasaran, menjangkau masyarakat miskin dan kurang mampu yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, mengalokasikan zakat

untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha, dan program kewirausahaan, dapat memberikan dampak jangka panjang yang lebih signifikan.



Sumber: Baitul Mal Aceh (2024) data diolah

Gambar 1.1 Jumlah Penyaluran Zakat di Provinsi Aceh

Gambar 1.1 memperlihatkan penyaluran zakat di Provinsi Aceh dalam rentang waktu 2017 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama pada periode awal pandemi. Pada tahun 2017, total zakat yang disalurkan sebesar Rp33,4 miliar, dan terus meningkat menjadi Rp41,7 miliar pada 2018 serta Rp47,2 miliar pada 2019. Kenaikan tajam terjadi pada tahun 2020, di mana penyaluran zakat melonjak hampir lima kali lipat menjadi Rp222,2 miliar. Lonjakan ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan sosial akibat pandemi COVID-19, yang mendorong lembaga zakat seperti Baitul Mal untuk memperluas cakupan distribusi, sekaligus meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap solidaritas ekonomi Islam. Namun, pada dua tahun berikutnya yaitu 2021 dan 2022, penyaluran zakat mengalami sedikit penurunan masing-masing menjadi Rp216,1 miliar dan Rp201,3 miliar, yang dapat mencerminkan tantangan dalam pengumpulan zakat atau keterbatasan dalam implementasi program. Meski demikian, pada tahun 2023, terjadi lonjakan kembali dengan total penyaluran

mencapai Rp285,4 miliar. angka tertinggi selama periode tujuh tahun terakhir. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa zakat di Provinsi Aceh telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari sisi nominal, dengan total pertumbuhan lebih dari delapan kali lipat dibandingkan tahun 2017. Namun, fluktuasi yang terjadi juga mengindikasikan perlunya penguatan kelembagaan, sistem penghimpunan, dan efektivitas program penyaluran agar zakat benar-benar memberikan dampak berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Zakat tidak hanya berfungsi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu secara langsung, tetapi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai stimulan bagi ekonomi lokal. Ketika zakat disalurkan secara efektif kepada mustahik (penerima zakat), dana tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Peningkatan daya beli ini pada gilirannya dapat memacu konsumsi domestik, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi (Ben Jedidia & Guerbouj, 2021).

Selama satu dekade terakhir, Provinsi Aceh menunjukkan upaya yang serius dalam mengelola zakat, yang didukung oleh institusi-institusi zakat resmi. Penyaluran zakat yang terus meningkat diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, dengan cara memperkuat basis ekonomi daerah ini. Studi yang dilakukan oleh Anggraini dkk. (2018) menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang positif dan substansial terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingginya penyaluran dana zakat mencerminkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin baik. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, dana zakat juga dapat dialihkan ke program-program jangka panjang yang lebih strategis, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan mustahik. Di masa depan, mustahik tersebut berpotensi menjadi muzaki (pembayar zakat). Dengan distribusi dana zakat yang merata akan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian oleh Lutfi & Fitria (2023) mendapatkan hasil yang betolak belakang. Penelitian ini, menunjukkan bahwa

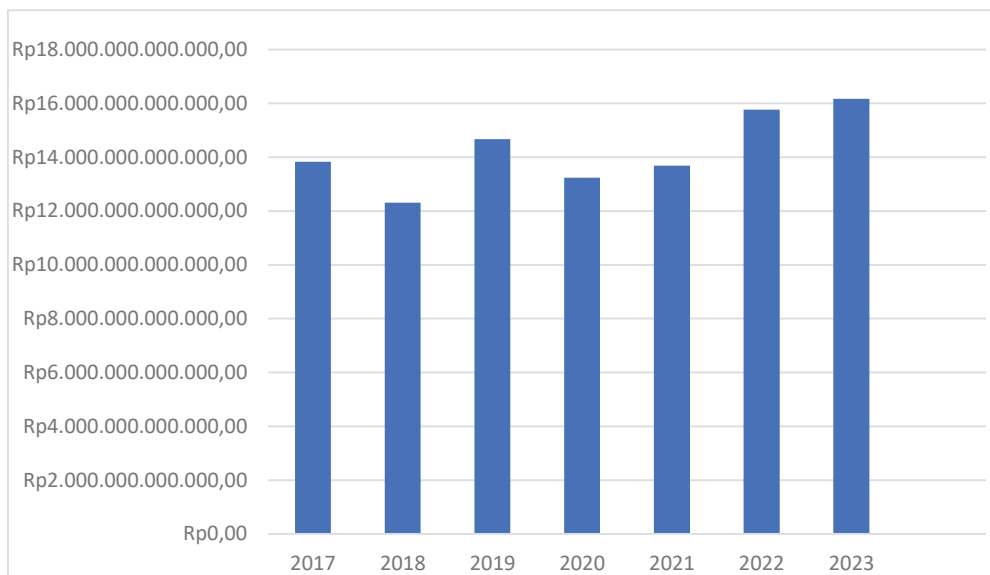
zakat tidak berdampak pada turun naiknya pertumbuhan ekonomi. Salah satu masalahnya adalah pengumpulan dan pendayagunaan zakat yang belum optimal. Pemanfaatan dana zakat yang masih kurang dimaksimalkan untuk kegiatan produktif, sehingga penyalurannya kepada masyarakat belum memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain zakat, dalam beberapa studi, belanja pemerintah juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, belanja pemerintah diarahkan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kemashlahatan umat. Belanja pemerintah yang efektif dan efisien menjamin pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Syadali dkk., 2023).

Setiap tahun, Pemerintah Provinsi Aceh menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pedoman dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran daerah. APBD tidak hanya mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah, tetapi juga menjadi alat utama dalam mendistribusikan sumber daya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Struktur APBD tersusun dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Salah satu aspek krusial dalam APBD adalah belanja daerah, yang mencakup berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial. Melalui belanja pemerintah yang efektif dan efisien, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terakselerasi, ketimpangan sosial dapat dikurangi, serta kualitas hidup masyarakat Provinsi Aceh semakin meningkat.

Struktur belanja daerah Provinsi Aceh terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah serta belanja bantuan sosial menjadi komponen dengan kontribusi yang terbesar pada tahun 2022 yakni sebesar 56,36 persen dari total realisasi belanja Pemerintah Provinsi Aceh. Belanja transfer merupakan komponen dengan kontribusi terbesar kedua terhadap total belanja Pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2022, kontribusi

belanja transfer mencapai 19,26 persen, yang setara dengan 3,23 triliun rupiah. Namun, belanja modal selama tahun 2022-2023 hanya berkontribusi sekitar 15 hingga 18 persen terhadap total belanja Pemerintah Provinsi Aceh, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi belanja operasional. Padahal, belanja modal memiliki dampak langsung terhadap penambahan aset bagi Pemerintah Provinsi Aceh, seperti pembangunan jalan, gedung, irigasi, dan lainnya. Sedangkan realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2022 adalah sebesar 448,85 miliar Rupiah atau berkontribusi sebesar 2,68 persen terhadap total realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Aceh.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024) data diolah

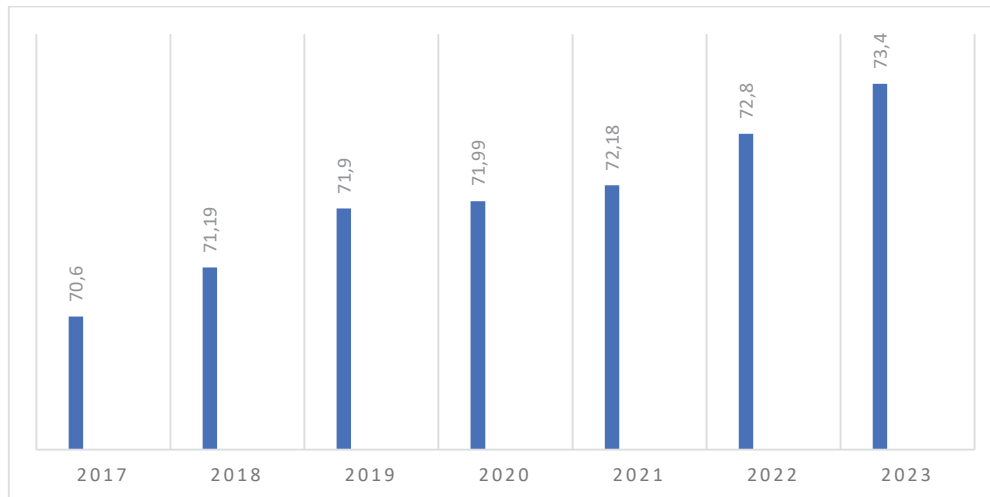
Gambar 1.2 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Aceh

Merujuk pada Gambar 1.2, belanja pemerintah di Provinsi Aceh sepanjang periode 2017 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis, namun secara umum mengalami tren peningkatan dalam jangka panjang. Pada tahun 2017, total belanja pemerintah mencapai Rp13,83 triliun, lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi Rp12,31 triliun. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan efisiensi anggaran atau pengaruh dari penyesuaian kebijakan fiskal pusat. Namun, pada tahun 2019, belanja kembali meningkat signifikan menjadi Rp14,67 triliun, sebelum turun lagi di tahun 2020 menjadi Rp13,24 triliun, yang kemungkinan besar

disebabkan oleh realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Sejak tahun 2021, tren belanja kembali menunjukkan peningkatan, yakni sebesar Rp13,68 triliun dan terus naik menjadi Rp15,77 triliun di tahun 2022 serta Rp16,17 triliun pada tahun 2023, yang merupakan angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Efektivitas belanja daerah dapat diukur dari sejauh mana pengeluaran tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Provinsi Aceh, terjadi fenomena yang menarik dimana menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Aceh berada di atas rata-rata nasional, namun tidak diikuti dengan pencapaian PDRB yang setara. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara besarnya pengeluaran dengan output ekonomi yang dihasilkan. Meskipun Provinsi Aceh memiliki kapasitas belanja yang tinggi, terutama didukung oleh dana otonomi khusus dan dana bagi hasil migas, namun produktivitas belanjanya masih belum optimal. Hal ini tercermin dari PDRB Provinsi Aceh yang justru berada di bawah rata-rata nasional, menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang besar belum efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Situasi ini menggambarkan perlunya evaluasi mendalam terhadap pola dan arah belanja Pemerintah Provinsi Aceh.

Di samping itu, pembangunan manusia juga berkontribusi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut Ibnu Khaldun kemajuan dan kemunduran peradaban suatu wilayah tergantung pada kualitas sumber daya manusianya (Chapra, 2008). Saat ini, tingkat pembangunan manusia diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi cenderung menggambarkan sumber daya manusia yang lebih sehat, terdidik, dan berkualitas (Arwani & Wahdati, 2020). Menurut paradigma pembangunan manusia yang dikembangkan oleh *United Nations Development Program*, pembangunan ekonomi harus dilihat tidak hanya dari segi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari segi peningkatan kualitas hidup manusia.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2024) data diolah

Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh

Merujuk pada Gambar 1.3, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh secara konsisten menunjukkan peningkatan, mencerminkan kemajuan berkelanjutan dalam pembangunan manusia di wilayah tersebut. Penelitian oleh Arwani & Wahdati (2020) menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berdampak cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi berkontribusi pada peningkatan kualitas penduduk, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja ekonomi. Hal ini mendorong efisiensi dan kreativitas masyarakat, sehingga produktivitas meningkat dan sumber daya dapat dikelola serta dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sejalan dengan hasil studi Nawawi dkk. (2022) yang juga menyebutkan bahwa terdapat pengaruh antara pembangunan manusia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian oleh Lutfi & Fitria (2023) bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya. Temuannya menyebutkan bahwa pembangunan manusia tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

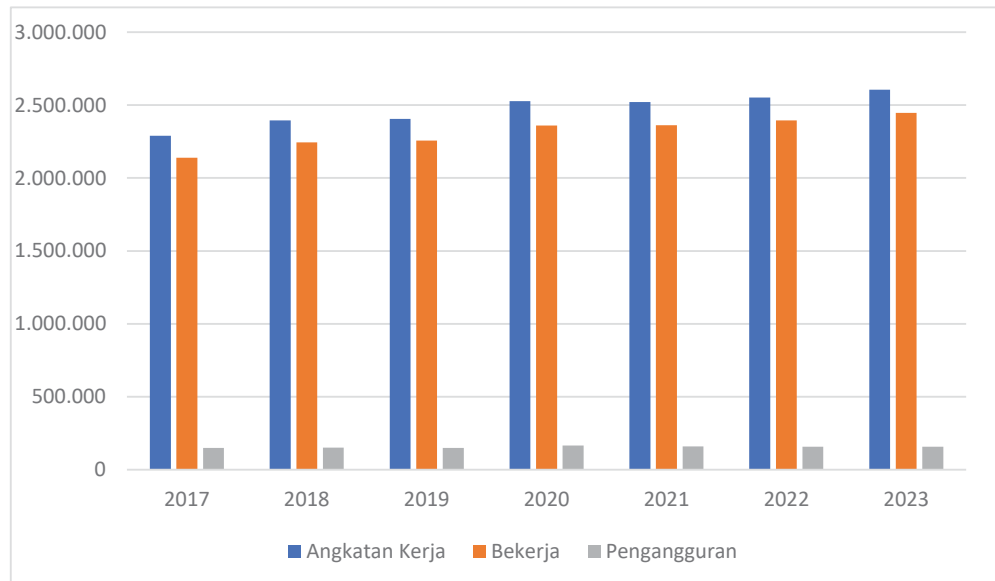
Di samping zakat, belanja pemerintah, dan pembangunan manusia, tenaga kerja juga merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja menentukan tingkat produktivitas dan daya saing perekonomian. Daerah dengan tenaga kerja yang terampil,

berpendidikan, serta mempunyai akses terhadap kesempatan kerja yang layak cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Sebaliknya, tingginya tingkat pengangguran dan kurangnya tenaga kerja terampil dapat menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi.

Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas bekerja (*al-'amal*) dipandang sebagai elemen fundamental yang mendorong kemajuan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Prinsip ketenagakerjaan dalam Islam mencakup dimensi yang lebih luas daripada sekedar pencapaian target produksi, melainkan juga mengintegrasikan nilai-nilai moral, prinsip keadilan distributif, dan tanggung jawab sosial. Provinsi Aceh dengan karakteristik ekonominya yang khas, dimana sektor agraris, niaga, dan pelayanan menjadi tulang punggung perekonomian, memerlukan penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional guna mendukung transisi menuju ekonomi berbasis industri dan jasa. Ajaran Islam menggarisbawahi bahwa bekerja memiliki makna multidimensi, tidak semata sebagai sarana pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga merupakan manifestasi ibadah dan aktualisasi peran manusia sebagai pemimpin di bumi. Konsep ini berlandaskan pada sejumlah *nash syar'i* baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang secara tegas menganjurkan umat untuk berusaha dan memperoleh rezeki melalui cara-cara yang diperbolehkan syariat.

Implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam ketenagakerjaan dapat memberikan solusi alternatif bagi berbagai permasalahan ketenagakerjaan kontemporer. Konsep seperti *ujrah* (upah yang adil), *mudharabah* (sistem bagi hasil), dan kewajiban pengembangan keterampilan pekerja dapat mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan produktif. Sistem ini tidak hanya memperhatikan aspek material, tetapi juga dimensi spiritual dan sosial, sehingga dapat mendorong terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh (*falah*) bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, pada Agustus 2024 tercatat bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Aceh mencapai 2,661 juta orang, terdiri dari 2,508 juta penduduk bekerja dan 153 ribu pengangguran. Dibandingkan dengan Agustus 2023, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 57 ribu orang, yang mencerminkan semakin banyaknya penduduk yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Kabar baiknya, jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan sebesar 61 ribu orang, menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Provinsi Aceh mulai bertambah. Sementara itu, jumlah pengangguran mengalami penurunan sebanyak 4 ribu orang, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam serapan tenaga kerja, meskipun masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran lebih lanjut. Meskipun terjadi perbaikan, tantangan dalam sektor ketenagakerjaan di Provinsi Aceh tetap perlu mendapat perhatian serius. Tingginya ketergantungan pada sektor pertanian dan informal masih menjadi hambatan dalam menciptakan pekerjaan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2024) data diolah

Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Aceh

Berdasarkan Gambar 1.4, Selama periode 2017 hingga 2023, jumlah angkatan kerja di Provinsi Aceh menunjukkan tren peningkatan stabil, yaitu dari 2.288.777 orang pada tahun 2017 menjadi 2.604.452 orang pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan bertambahnya penduduk usia produktif yang siap bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan dari 2.138.512 jiwa pada 2017 menjadi 2.447.345 jiwa pada 2023, menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja secara umum ikut meningkat. Namun, jumlah pengangguran tetap berada pada kisaran 148.000-166.000 orang, dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu 166.600 jiwa. Lonjakan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia usaha dan lapangan kerja. Meski begitu, angka pengangguran menurun kembali pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 157.107 jiwa pada tahun 2023, menandakan adanya pemulihan pasar tenaga kerja. Rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja yang terserap juga relatif stabil, yang mengindikasikan tingkat partisipasi kerja yang cukup tinggi di Provinsi Aceh. Namun, meskipun jumlah orang bekerja meningkat, tidak serta-merta menjamin kualitas pekerjaan yang baik atau produktif.

Penelitian oleh Widayati dkk. (2019) menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki pekerjaan, pendapatannya akan turut meningkat. Peningkatan pendapatan tersebut akan mendorong kenaikan daya beli masyarakat. Dengan demikian, bertambahnya jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sari dkk. (2016) yang juga menyebutkan bahwa tenaga kerja mengambil peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian oleh Kuncoro dkk. (2022) mendapatkan hasil yang bertolak belakang. Temuannya menyebutkan bahwa tenaga kerja tidak berdampak pada naik turunnya pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini mengidentifikasi *gap* dalam berbagai aspek terkait pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, termasuk potensi zakat yang besar namun

pengelolaan zakat yang belum optimal, serta perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai dampak zakat, belanja pemerintah, pembangunan manusia dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Provinsi Aceh, dengan karakteristik Islam yang kental dan penerapan hukum syariah, memerlukan analisis mendalam tentang efektivitas zakat sebagai instrumen pendapatan daerah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya belanja pemerintah dalam infrastruktur dan layanan dasar, serta bagaimana pembangunan manusia yang tinggi dan tenaga kerja dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada periode 2017-2023.

Penelitian ini mengacu pada studi sebelumnya yang dilakukan oleh Rozaqi (2018) dengan judul *Analisis Pengaruh Dana Zakat, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2011-2014*. Namun, penelitian tersebut memiliki keterbatasan dalam cakupan periode waktu, yaitu hanya mencakup tahun 2011-2014. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melanjutkan dan memperluas kajian tersebut rentang waktu analisis dari 2017-2023. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh penyaluran zakat, belanja pemerintah, pembangunan manusia dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh serta melihat bagaimana perkembangan yang terjadi dalam periode analisis yang lebih panjang.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Penyaluran zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat, terutama bagi para penerima zakat (mustahik). Hal ini sejalan dengan teori ekonomi makro yang menyatakan bahwa kenaikan konsumsi berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah dan pembangunan manusia juga berkontribusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat menciptakan peluang kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Selain faktor-faktor tersebut, tenaga kerja juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah penyerapan tenaga kerja dalam berbagai lapangan usaha dapat meningkatkan produktivitas dan output nasional. Namun, berdasarkan data yang telah dipaparkan dalam latar belakang, peningkatan zakat, belanja pemerintah, pembangunan manusia, serta tenaga kerja tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan hasil yang inkonsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dan keterbatasan dari penelitian-penelitian sebelumnya guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama di Provinsi Aceh.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang dan pernyataan masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh penyaluran zakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?
4. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan pernyataan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh penyaluran zakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh

2. Untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh
3. Untuk menganalisis pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh
4. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh

1.4 Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan menyajikan kajian ilmiah tentang keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel penyaluran zakat, belanja pemerintah, pembangunan manusia dan tenaga kerja.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi acuan akademis bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian serupa.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Temuan penelitian dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan di Provinsi Aceh terkait optimalisasi pengelolaan zakat dan alokasi anggaran pemerintah
 - b. Temuan penelitian dapat membantu lembaga pengelola zakat dan instansi pemerintah dalam menyusun program yang efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Kontribusi Agamis
 - a. Temuan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran strategis zakat sebagai alat ekonomi yang berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.